

**KESENJANGAN GENDER PADA PEMANFAATAN PERIKANAN SKALA  
KECIL DI KABUPATEN NATUNA**

*GENDER GAPS IN SMALL SCALE FISHERY USE IN NATUNA DISTRICT*

**Paper**



**Oleh :**

**Ramdhan Eka Syah Putra**

**POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

**2024**

**GENDER DI SEKTOR PERIKANAN**

***KESENJANGAN GENDER PADA PEMANFAATAN PERIKANAN SKALA  
KECIL DI KABUPATEN NATUNA***

Oleh :

**RAMDHAN EKA SYAH PUTRA**

**NRP : 59235115074**



**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERAIRAN**

**POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PAPER**

Judul : kesenjangan gender pada pemanfaatan perikanan skala kecil kabupaten  
natuna

Penyusun : Ramdhan eka syah putra

NRP : 59235115074

Program studi : Teknologi pengelolaan sumber daya perairan

Menyetujui :

Dosen pengampu

Reynaldy indra syahputra M.Sc

Tanggal pengumpul

**KESENJANGAN GENDER PADA PEMANFAATAN PERIKANAN SKALA  
KECIL DI KABUPATEN NATUNA**

***Politeknik Ahli Usaha Perikanan***

***Jl. AUP, Jati Padang, Pasar Minggu, RT.1/RW.9, Jati Padang Ps minggu,***

***Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta***

***Telepon:0217806874 Kode Pos: 12520***

***[Email:kidhon01@gmail.com](mailto:kidhon01@gmail.com)***

**Ramdhan Eka Syah putra**

**ABSTRAK**

Kesenjangan gender atau perbedaan peran laki-laki dan perempuan terhadap akses dan kontrol dalam pengambilan keputusan pada aktivitas perikanan skala kecil di Kabupaten Natuna masih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan gender pada pemanfaatan perikanan skala kecil di Kabupaten Natuna dan merumuskan strategi untuk mencapai kesetaraan gender. Data yang digunakan adalah data primer yang terpilah gender. Data primer dikumpulkan pada bulan Agustus 2019 terhadap 52 responden nelayan penangkap ikan skala kecil di 5 (lima) kecamatan di Pulau Bunguran – Kabupaten Natuna. Data diolah dan dianalisis untuk memperoleh persentase tiga keputusan responden pada 5 kecamatan tersebut. Hasil analisis menunjukkan pengambilan keputusan pada perikanan skala kecil di Kabupaten Natuna masih didominasi oleh laki-laki. Kesenjangan gender terjadi pada aktivitas persiapan penangkapan ikan, kegiatan penangkapan ikan di laut, paska panen (penangkapan) ikan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna perlu merancang program stimulasi ekonomi untuk membuka lapangan kerja bagi perempuan dan

memberi peluang partisipasi terhadap istri nelayan dalam pengambilan keputusan, dengan melibatkannya dalam kegiatan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) atau pengurus armada penangkapan ikan.

## **PENDAHULUAN**

- **Latar belakang**

Menurut konsep Women in Development yang digagas oleh Moser (1993), perempuan diikutsertakan dalam program agar mendapat equitas, sehingga memperoleh kesejahteraan. Namun, faktanya perempuan sulit mendapat equitas, karena akses dan kontrol tidak diperoleh, seperti pada program revolusi hijau dan tambak inti rakyat yang telah disebutkan di atas. Pada sisi lain konsep Gender and Development (Levy, 1996) dikembangkan untuk mendorong kesetaraan laki-laki dan perempuan melalui akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dalam keputusan alokasi berbagai potensi sumber daya dari program pembangunan.

Pemerintah Indonesia berupaya menghilangkan kesenjangan tersebut melalui pengorganisasian perempuan dalam kelompok-kelompok usaha, sehingga mereka mendapat akses dan kontrol terhadap berbagai kegiatan pembangunan Pada masyarakat perikanan, pengorganisasian perempuan dilakukan melalui kelompok-kelompok usaha, seperti Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) dan Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) (Kurniawan, Triyanti, & Nurlaili, 2020; Shafitri, Triyanti, & Zulham, 2020). Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna (2020) mencatat pada tahun 2019, jumlah Poklahsar, KUB, dan Pokdakan masing-masing 82 kelompok, 172 kelompok, dan 132 kelompok. Pengorganisasian perempuan dalam kelompok tersebut merupakan strategi agar perempuan berpartisipasi di dalam perekonomian, sehingga mereka dapat memperbaiki ekonomi rumah tangga (Triyanti, Shafitri, & Kurniawan, 2020). Di Cituis Kabupaten Tangerang mendorong perempuan bekerja pada berbagai kegiatan produktif (Hikmah, Nurlaili, & Soejarwo, 2020). Hikmah et al. (2020) melaporkan juga perempuan di Cituis mendapat akses meminjam uang di koperasi untuk membiayai kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan suami.

Ketidaksetaraan gender terkait dengan akses serta kontrol laki-laki dan perempuan pada masyarakat perikanan di Kabupaten Natuna perlu diidentifikasi paska implementasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa yang dibangun untuk mengembangkan perekonomian dan perikanan skala kecil di Kabupaten Natuna dan memberikan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat perikanan kabupaten natuna.

- **KESENJANGAN GENDER PADA AKTIVITAS PERIKANAN SKALA KECIL**

Perempuan pada aktivitas perikanan skala kecil merupakan bagian dari angkatan kerja di Kabupaten Natuna. Data terpilah gender dari BPS Kabupaten Natuna tentang jumlah perempuan dan laki-laki yang bekerja pada kegiatan perikanan belum tersedia. Terkait dengan hal itu, perempuan di Kabupaten Natuna tidak menangkap ikan ke laut, tetapi perempuan bisa ikut serta di dalam keputusan-keputusan untuk menangkap ikan ke laut, karena keputusan itu berpengaruh terhadap ekonomi rumah tangga nelayan. Oleh sebab itu, pengamatan lapangan tentang peran perempuan di dalam pengambilan keputusan dijadikan acuan menjelaskan fenomena gender pada perikanan skala kecil. Partisipasi perempuan terhadap keputusan pemanfaatan perikanan skala kecil, termasuk di Kabupaten Natuna dipengaruhi oleh norma dan budaya.

### **Kesenjangan gender pada persiapan penangkapan ikan**

Proses pengambilan keputusan pada persiapan penangkapan ikan, meliputi keputusan tentang penentuan lokasi penangkapan ikan, penentuan alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan, keputusan mengganti dan membeli alat tangkap baru, serta keputusan tentang pengelolaan investasi. Empat kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang keputusannya dapat ditentukan perempuan bersama laki-laki, karena terkait erat dengan sumber ekonomi rumah tangga. Pada Kecamatan Bunguran Selatan, Bunguran Timur, dan Kecamatan Bunguran Timur Laut, akses dan kontrol perempuan terhadap keputusan penentuan lokasi penangkapan ikan dapat dikatakan tidak ada, meskipun perempuan mengetahui pada komunitas perikanan terjadi “jual beli” koordinat lokasi penangkapan ikan. Fenomena penjualan jual beli koordinat ini tidak pernah terjadi di perairan lain di Indonesia. Keputusan penentuan lokasi penangkapan ikan 100% didominasi oleh laki-laki. Keputusan terjadi pada siang hari ketika nelayan berkumpul pada warung kopi di tempat pendaratan ikan. Keputusan itu diambil pada tempat yang tidak pernah ada perempuan.

Pada pembelian alat tangkap ikan baru, akses dan kontrol perempuan terhadap pembelian alat tangkap baru di Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, dan Kecamatan Pulau Tiga diperoleh melalui kompromi laki-laki dan perempuan. Keputusan kompromi laki-laki dan perempuan yang paling tinggi terdapat di Bunguran Utara (100%),

sementara di Kecamatan Bunguran Timur (10,5%), Bunguran Timur Laut (5,3%), dan Pulau Tiga (33,3%). Kompromi pengambilan keputusan itu dilakukan karena pembelian alat tangkap baru itu memerlukan uang, yang dapat mempengaruhi keuangan rumah tangga

### **Kesenjangan gender pada kegiatan penangkapan ikan**

Pada kegiatan penangkapan ikan, perempuan tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan secara langsung di laut karena norma yang berlaku dipersepsikan demikian. Dominasi laki-laki di dalam mengambil keputusan lama melaut dan jumlah tenaga kerja saat melaut terlihat dari jawaban responden di Kecamatan Bunguran Selatan dan Kecamatan Bunguran Timur (Tabel 2). Penelitian yang dilakukan oleh Zulham (2017) & Zulham, (2020) menunjukkan bahwa di Kabupaten Natuna, keputusan nelayan lama melaut itu ditentukan ketika nelayan berkumpul di tempat pendaratan ikan bersama pedagang ikan setempat (toke), penentuan ini terkait dengan perbekalan melaut yang harus disediakan toke. Selain itu, dalam melakukan penangkapan ikan di laut, nelayan perikanan skala kecil Kabupaten Natuna dilakukan bersama kerabat dekat.

Keputusan menentukan lama melaut dan jumlah tenaga kerja yang melaut di Kecamatan Bunguran Selatan dan Bunguran Timur menunjukkan kuatnya dominasi laki-laki. Akses (kesempatan) dan kontrol (kewenangan) perempuan terhadap hal itu dapat dikatakan tidak ada. Hal ini menunjukkan pengaruh toke sangat kuat dan mempengaruhi relasi gender pada dua kecamatan itu. Toke telah berinvestasi membiayai kegiatan penangkapan ikan, sehingga keinginan toke harus diikuti.

Namun, akses dan kontrol perempuan terhadap keputusan lama melaut dan jumlah tenaga kerja saat melaut pada responden di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Bunguran Utara, dan Kecamatan Pulau Tiga menunjukkan perempuan di Kecamatan tersebut mendapat peluang dan wewenang yang sama, artinya dominasi toke mulai berkurang pada tiga kecamatan tersebut. Keputusan kompromi tentang lama melaut di Bunguran Utara, Bunguran Timur Laut, dan Pulau Tiga masing-masing adalah 100%, 46,7%, dan 66,7%. Sementara tentang penggunaan tenaga kerja untuk melaut di Bunguran Utara 100%, Bunguran Timur Laut 53,3%, dan Pulau Tiga 33,3%. Masyarakat di kecamatan tersebut telah berinteraksi dengan masyarakat pendatang dalam aktivitas penangkapan ikan. Hal ini terjadi sejak adanya program bantuan dan program SKPT yang mendorong nelayan setempat bekerja sama dengan nelayan pendatang terkait dengan transfer teknologi serta ketrampilan melaut.

Interaksi ini berpengaruh terhadap keputusan kompromi laki-laki dan perempuan karena terkait dengan pendapatan rumah tangga.

Keputusan kompromi terjadi dipengaruhi adanya interaksi dengan pedagang ikan dari Batam serta dari Tanjung Balai Karimun. Interaksi tersebut juga berpengaruh terhadap relasi gender tentang lama menangkap ikan dan penentuan pekerja yang melaut yang menentukan perolehan pendapatan rumah tangga nelayan.

### **Kesenjangan gender paska panen (penangkapan) ikan**

Relasi gender pada kegiatan paska panen ikan terkait dengan penentuan lokasi mendaratkan ikan, alokasi penjualan hasil tangkapan, dan sistem penjualan hasil tangkapan. Perempuan, walaupun tidak melaut namun partisipasinya mempengaruhi kegiatan tersebut. Akses dan kontrol perempuan.

yang lemah dalam penentuan lokasi pendaratan ikan pada lima kecamatan di Natuna menunjukkan perempuan tidak diberi akses di dalam keputusan menentukan lokasi pendaratan ikan, tetapi dipengaruhi oleh toke ikan. Toke ikan Natuna telah memberi modal kegiatan penangkapan ikan sehingga penentuan lokasi dikendalikan oleh nelayan bersama toke. Beberapa nelayan yang tidak tergantung pada toke, keputusan mendaratkan ikan ditentukan dengan keputusan bersama, karena perempuan (istri nelayan) selanjutnya akan memasarkan hasil tangkapan itu ke pasar. Akses dan kontrol perempuan seperti itu hanya terjadi pada beberapa responden di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, dan Kecamatan Pulau Tiga. Keputusan ini sangat rapuh dan dapat berubah jika responden tersebut menerima modal atau biaya melaut dari toke ikan Natuna. Perubahan ini dapat terjadi karena koperasi nelayan di Natuna masih belum berfungsi.

Fenomena kesenjangan gender tentang keputusan alokasi penjualan hasil tangkapan erat kaitannya dengan keputusan penentuan lokasi pendaratan ikan. Alokasi penjualan tersebut berkaitan dengan tujuan kerja sama yang dibangun toke ikan dari luar Natuna dan toke ikan Natuna dengan nelayan perikanan skala kecil. Kerja sama tersebut adalah untuk mendapatkan alokasi hasil tangkapan nelayan untuk dijual ke pasar ekspor (Singapura), sehingga akses dan kontrol perempuan terhadap keputusan alokasi penjualan hasil tangkapan sangat terbatas seperti di Kecamatan Bunguran Timur dan Kecamatan Bunguran Timur Laut. Di Kecamatan Pulau Tiga, akses keputusan kompromi laki-laki dan perempuan tentang alokasi penjualan cukup besar karena ikan yang dijual harus dikumpulkan di tempat responden sebelum diambil pedagang (toke) karena masalah transportasi.

### **Penutup**

Relasi laki-laki dan perempuan menjadi bagian penting dalam membangun perekonomian dan pengembangan perikanan skala kecil di Kabupaten Natuna. Kontribusi perempuan pada berbagai aktivitas di dalam kegiatan persiapan penangkapan ikan,

penangkapan ikan, dan paska penangkapan ikan masih terbatas. Di Kabupaten Natuna terdapat lapangan usaha yang kontribusinya kecil dalam perekonomian, namun, mampu menampung tenaga kerja perempuan dalam jumlah besar (Lapangan Usaha Industri Pengolahan). Lapangan usaha ini harus didorong dengan program pembangunan agar skala usahanya berubah tidak lagi skala usaha rumah tangga. Pada sisi lain terdapat lapangan usaha yang kontribusinya besar (Pertambangan dan Penggalian), tetapi penyerapan tenaga kerjanya terbatas karena skill yang dipersyaratkan untuk dapat bekerja pada lapangan usaha tersebut. Oleh sebab itu, skill tenaga kerja laki-laki dan perempuan untuk lapangan usaha seperti ini harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

Pada relasi gender perikanan skala kecil di Kabupaten Natuna, peran toke (pedagang) Natuna dan dari luar Natuna sangat berpengaruh. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu melibatkan toke agar pembangunan ekonomi masyarakat perikanan di Kabupaten Natuna dapat berkembang. Toke ikan tersebut perlu dijadikan mitra kerja sama pemerintah di dalam melakukan program pengarusutamaan gender untuk mewujudkan berfungsinya SKPT dan mengembangkan tempat pendaratan ikan. Toke ikan tersebut perlu dijadikan mitra untuk menumbuhkan bisnis pengolahan ikan pada tempat pendaratan ikan sehingga kehadiran perempuan pada tempat tersebut dapat terwujud.

## Daftar Pustaka

Anonim. (2015). *Humanity Divided: Confronting inequality in developing countries*. Gender inequality (Chapter 5) p: 161-193. [https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Inclusive%20development/Humanity%20Divided/HumanityDivided\\_Ch5\\_low.pdf](https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Inclusive%20development/Humanity%20Divided/HumanityDivided_Ch5_low.pdf).

Barclay K., Leduc B., Mangubhai S., Vunisea A., Namakin B., Teimarane M. & Leweniqila L. (2019). Module 1: Introduction. In: Barclay K., Leduc B., Mangubhai S. and Donato-Hunt C. (eds.). *Pacific handbook for gender equity and social inclusion in coastal fisheries and aquaculture*. Pacific Community (SPC), Noumea, New Caledonia. 20 p.

Bennett, E. (2005). Gender, fisheries and development. *Marine Policy*, 29: 451-459.

[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna. (2020). *Kabupaten Natuna Dalam Angka 2019*. pp 374.

[DKP] Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna. (2020). *Buku Saku Perikanan Natuna 2019*. pp 45.

- Dunham, S.A. (2008). *Revolusi Hijau dan Masalah Kesenjangan Sosial dalam Pendekar Pendekar Besi Nusantara*. Penerbit Mizan. pp: 70-75
- Damsar, & Indrayani. (2009). *Pengantar Sosiologi ekonomi*. Edisi kedua. Penerbit Kencana Prenadamedia Group. pp. 318.
- Fitriana, R & M. Kurufat. (2020). Changing land use patterns threaten the livelihood of female crab collectors in Merauke, Papua, Indonesia. *Yemaya, ICFS's Newsletter on Gender and Fisheries*. No.61. Augut. 2020. pp: 6-8.
- Groenmeyer, S. (2015). The long road to freedom. *Yemaya, ICFS's Newsletter on Gender and Fisheries*. No.50. Dec. 2015. pp: 8-10.
- Harper, S. (2016). Counting on Women. *Yemaya, ICFS's Newsletter on Gender and Fisheries*. No.51. April 2016. pp: 2-4.
- Hakiki, G., Supriyanto, S., Ulfah, A., Prastiwi, D., Larasati, W., Khoer, M. I. (2019). *Profil Perempuan Indonesia 2019*. Kerja sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Badan Pusat Statistik.
- Hikmah, Nurlaili, & Soejarwo, P. A. (2020). Analisis gender pada rumah tangga nelayan di Desa Cituis Kabupaten Tangerang, dalam Zulham, Hikmah, Shafitri, & Yuliaty (eds). *Pemberdayaan Perempuan dan Kematangan Gender Kelompok Usaha Perikanan*. IPB Press. pp: 186.
- ILO. (2016). *Empowering Women in Rural Economy. Decent Work in the Rural Economy. Policy Guidance Notes*. ILO Office. Geneve. P.16.
- Kurniawan, T., Triyanti, R., & Nurlaili. (2020). Kinerja program pengarusutamaan gender di Sektor Kelautan dan Perikanan, dalam Zulham, Hikmah, Shafitri, & Yuliaty (eds). *Pemberdayaan Perempuan dan Kematangan Gender Kelompok Usaha Perikanan*. IPB Press. pp: 186.
- Levy, C. (1996). 'The Process of Institutionalising Gender in Policy and Planning: The "Web" of Institutionalisation', Working Paper No. 74, Development Planning Unit, University College London.
- Lopes, J. L., Duarte, A., & Tilley, A. (2020). Strong Women, Strong Nation. *Samudera* No.83. September 2020: 29 – 32.
- Lepeniotia, K., Bousdekisa, A., Apostolou, D., & Mentzas, G. (2020). Prescriptive analytics: Literature review and research challenges. *International Journal of Information Management* 50 (2020) 57–70
- Moser, C. (1993). *Gender Planning and Development 'Theory, Practice and Training'*. Routledge, London.
- Paul, P., & Meena, B. S. (2016). A study on access to and control over resources: gender perspective. *International Journal of Science, Environment and Technology*, Vol. 5, No 5, 2016, 2982 – 2988.
- Ponthieux, S., & Dominique, M. (2015). Gender Inequality. *Handbook of Income Distribution*. Chapter 12. Vol.2:981-1146

Rahmawati, F., & Abdulkadir-Sunito, M. (2013). The Influencing Factors of Access and Control Men and Women in Community Forest Resources Management. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol (01) 03: 206-221

Rahayu, W. K. (2016). Analisis pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik (studi kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*. Vol (2)1

Shafitri, N., Triyanti, R., & Zulham, A. (2020). Pengarusutamaan gender pada komunitas perikanan skala kecil, dalam Zulham, Hikmah, Shafitri, & Yuliaty (eds). *Pemberdayaan Perempuan dan Kematangan Gender Kelompok Usaha Perikanan*. IPB Press. pp: 186.

Sofiani, T. (2009). Membuka ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan. *Muwazah* 1(1): 63-71.

Triyanti, R., Shafitri, N., & Kurniawan, T. (2020). Gender pada kelompok rumah tangga pengolah hasil perikanan, dalam Zulham, Hikmah, Shafitri dan Yuliaty (eds). *Pemberdayaan Perempuan dan Kematangan Gender Kelompok Usaha Perikanan*. IPB Press. pp: 186.

Villamor, G. B., Meine, V. N., Utkur, D., Ma Elena, C., & Delia, C. (2014). Gender differences in land-use decisions: shaping multifunctional landscapes? *Current Opinion in Environmental Sustainability*: 2014, 6:128–133. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cosust.2013.11.015>

Winarno, B. (2003). Komparasi organisasi pedesaan dalam pembangunan: Indonesia vis-à-vis Taiwan, Thailand dan Filipina. *Media Pressindo*. pp: 264.

Wardono, B., Muhartono, R., Apriliany, T., Hikmah, & Zulham, A. (2020). Traditional Fisheries Supply Chain Management in The Border Area: The Natuna Islands, Indonesia. *Proceeding The 3rd International Symposium on Marine and Fisheries Research (3rd ISMFR)*. Volume 147 (2020). DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202014702009>

World Economic Forum. (2014). Gender, gender concept and definition. Modul 1. *Manual for Trainers: Gender Equality and Gender Mainstreaming*. 14 pages. Available at: [http://reports.weforum.org/\\_static/global\\_gender\\_gap-2014/MNG.pdf](http://reports.weforum.org/_static/global_gender_gap-2014/MNG.pdf)

Zulham, A. (2020). Prolog: peran perempuan dan gender dalam pembangunan perikanan. Dalam Zulham, Hikmah, Shafitri dan Yuliaty (eds). *Pemberdayaan Perempuan dan Kematangan Gender Kelompok Usaha Perikanan*. IPB Press. pp: 186

Zulham, A., Subaryono, & Regy, F. A. (2017). *Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap Di Natuna Dan Sekitarnya*. Penerbit. PT RajaGrafindo Persada, Depok. pp. 66